



**Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini**

e-ISSN: 2723-6390, hal. 389-403

Vol. 5, No. 1, Juli 2024

DOI: 10.37985/murhum.v5i1.563

## **Menyongsong Masa Depan: Survei Implementasi Pendidikan Inklusi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini**

**Thiana Nurussakinah<sup>1</sup>, Sima Mulyadi<sup>2</sup>, dan Gilar Gandana<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup> Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia*

**ABSTRAK.** Pelaksanaan pendidikan inklusi sudah ada dalam kebijakan pemerintah yaitu dalam UU No 70 Tahun 2009, tetapi apakah semua sekolah sudah memenuhi kriteria ataupun prinsip dalam melaksanakan pendidikan inklusif jenjang PAUD. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena yang terjadi dalam implementasi pendidikan inklusi pada jenjang pendidikan anak usia dini. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel kepala sekolah dan guru di Kota Tasikmalaya. teknik pengumpulan data melalui survey dengan penyebaran kuisioner serta penggunaan wawancara tidak terstruktur dan observasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterpenuhan pelaksanaan pendidikan inklusi pada jenjang pendidikan anak usia dini di Kota Tasikmalaya. Teknik analisis statistik deskriptif yang digunakan adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi, tendensi sentra (mean, median, modus), dan penghitungan ukuran penyebaran. Sehingga hasil dapat mendeskripsikan persepsi guru, keterpenuhan sekolah dan memaparkan fasilitas pendukung pelaksanaan pendidikan inklusi. Berdasarkan hasil penelitian survei yang dilakukan di 5 sekolah dan 36 guru menunjukkan bahwa 79% guru mempunyai persepsi yang setuju, 58% kategori cukup dalam ketepenuhan implementasi sekolah dan 60% dalam kategori cukup untuk fasilitas. Persepsi dari guru sudah menunjukkan adanya semangat dan persepsi yang baik terhadap implementasi pendidikan inklusi hanya saja dalam ketepenuhan sekolah dan fasilitas masih menjadi tantangan dan hambatan dalam pengimplementasian pendidikan inklusi.

**Kata Kunci :** *Anak Usia Dini; Implementasi; Pendidikan Inklusi*

**ABSTRACT.** The implementation of inclusive education already exists in government policy, namely in Law No. 70 of 2009, but whether all schools have met the criteria or principles in implementing inclusive education at the PAUD level. This study aims to reveal the phenomena that occur in the implementation of inclusive education at the early childhood education level. Using a descriptive quantitative approach with a sample of principals and teachers in Tasikmalaya City. data collection techniques through surveys by distributing questionnaires as well as the use of unstructured interviews and observations aimed at finding out how the fulfillment of the implementation of inclusive education at the early childhood education level in Tasikmalaya City. Descriptive statistical analysis techniques used are the presentation of data in the form of tables or frequency distributions, tendency centers (mean, median, mode), and calculation of measures of spread. So that the results can describe teacher perceptions, school fulfillment and describe supporting facilities for implementing inclusive education. Based on the results of survey research conducted in 5 schools and 36 teachers, it shows that 79% of teachers have an agreeable perception, 58% in the sufficient category in the fulfillment of school implementation and 60% in the sufficient category for facilities. The perceptions of teachers have shown enthusiasm and good perceptions of the implementation of inclusive education, it's just that the fulfillment of schools and facilities is still a challenge and obstacle in implementing inclusive education.

**Keyword :** *Early childhood; implementation; inclusive education*

Copyright (c) 2024 Thiana Nurussakinah dkk.

✉ Corresponding author : Thiana Nurussakinah

Email Address : thiananur@upi.edu

Received 7 April 2024, Accepted 7 Mei 2024, Published 8 Mei 2024

## **PENDAHULUAN**

Semua individu, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, seperti yang dinyatakan dalam peraturan pendidikan nasional nomor 70 tahun 2009 dan undang-undang nomor 20 tahun 2003. Anak-anak berkebutuhan khusus juga dapat bersekolah di sekolah reguler, terutama untuk pendidikan usia dini [1]. Pendidikan untuk anak-anak yang memiliki kelainan, keterbelakangan mental, keterlambatan perkembangan, gangguan, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dikenal dengan istilah pendidikan inklusi [2]. Semua siswa, termasuk mereka yang tuna rungu, tuna wicara, dan tuna grahita, bersekolah di sekolah reguler sebagai bagian dari pendidikan inklusi [3]. Indikator kebijakan program pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah atau kebijakan publik diperlukan untuk mengatasi masalah yang berasal dari implementasi program, aktivitas, aksi, keputusan, dan sikap yang dilakukan oleh beberapa pihak. Hal ini membutuhkan strategi yang berbeda dari lembaga-lembaga tradisional. Meskipun pemerintah berharap bahwa sekolah prasekolah secara keseluruhan akan menerima siswa berkebutuhan khusus, partisipasi penuh tidak akan terdorong jika lembaga tidak memiliki fasilitas yang diperlukan, guru yang berkualitas, dukungan orang tua, dan kelas reguler yang mengakui dan menghargai keragaman siswa [4].

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus usia dini. Inklusi anak usia dini diperlukan untuk memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus sejak dini. Sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah. Untuk memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, maka pendidikan anak usia dini harus disediakan karena jika dilihat dari penelitian sebelumnya kebanyakan penelitian dilakukan pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Untuk memastikan bahwa pendidikan anak usia dini bersifat inklusif dan untuk menghindari diskriminasi pendidikan, harus ada peraturan yang berkekuatan hukum, dan anak-anak berkebutuhan khusus harus diterima dalam sistem pendidikan anak usia dini [5]. Semua warga negara, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [6]. Keanekaragaman adalah karunia tuhan. Di lingkungan akan ada berbagai sifat anak-anak atau orang-orang. Faktor yang mempengaruhi keragaman individu termasuk usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, dan kepercayaan, serta beberapa faktor lainnya. Pendidikan yang inklusif membantu memperbaiki keragaman, mengajarkan satu sama lain untuk mengakui dan menghormati satu sama lain, menumbuhkan empati di mana pun lingkungan menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan, memberikan perspektif tenggang rasa, meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan karakter, sehingga menjadi budaya yang dapat digunakan setiap hari. Hal ini menumbuhkan lingkungan yang positif dengan mendorong anak-anak untuk belajar dan menerima perbedaan. Sehingga mendukung keberhasilan anak-anak dengan menyongsong masa depan untuk menjadi warga negara yang inklusif dan bertanggung jawab.

Secara global, terdapat tren peningkatan implementasi pendidikan inklusif jenjang paud. Hal ini didorong oleh kesadaran yang semakin tinggi akan hak-hak anak penyandang disabilitas dan manfaat pendidikan inklusif bagi semua anak. Data persentase implementasi pendidikan inklusif jenjang paud di Indonesia berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK) tahun 2022 di Jawa Barat yaitu 22,3%. Namun, menurut data dari dinas pendidikan Kota Tasikmalaya pada tahun 2022, terdapat 10 sekolah paud yang telah menerapkan pendidikan inklusif. Dari 10 sekolah tersebut, 5 sekolah berada di tingkat kecamatan dan 5 sekolah berada di tingkat kelurahan. Meskipun data persentase implementasi belum tersedia, keberadaan 10 sekolah paud inklusif menunjukkan bahwa pendidikan inklusif mulai diterapkan di Kota Tasikmalaya. Sehingga ke depannya akan semakin banyak sekolah paud yang menerapkan pendidikan inklusif sehingga semua anak di Kota Tasikmalaya dapat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Guru kelas harus memahami konteks dan kebutuhan setiap siswa agar mereka dapat membantu dan membantu anak dengan baik. Kondisi peserta didik sangat beragam secara sosial, emosi, akademik, dan intelektual. Untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan pembelajaran setiap anak, guru harus dapat mengidentifikasi dan memahami kondisi setiap anak untuk mengetahui apakah siswa memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan layanan pendidikan inklusif di sekolah reguler [7].

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 51 menyatakan: "Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus." istilah "difabel" atau "penyandang difabel" juga digunakan untuk menggambarkan penyandang disabilitas dalam masyarakat. Jenis kekhususan/ ragam disabilitas peserta didik yaitu ada disabilitas fisik jenis kekhususannya tuna daksa ringan, tunadaksa sedang, dan cerebral palsy. Disabilitas intelektual, jenis kekhususannya tunagrahita ringan, tunagrahita sedang dan down syndrom. Disabilitas mental, jenis kekhususannya yaitu autisme dan hiperaktif. Disabilitas sensorik (disabilitas rungu, wicara, dan netra) jenis kekhususannya tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Disabilitas ganda dan kelompok lain jenis kekhususannya yaitu tunaganda dengan lamban belajar (slow learner), tunalaras dengan add/adhd dan learning disabilities (ld) yaitu disleksia (sulit membaca) diskalkulia (sulit berhitung), disgrafia (sulit menulis), dan dysfraxia (gangguan gerakan dan koordinasi).

Pasal 11(b) dari mandat untuk seleksi masuk di lembaga penyedia pendidikan mengharuskan adanya akomodasi yang wajar bagi individu dengan disabilitas. Undang-undang menetapkan bahwa tenaga medis profesional dan/atau spesialis harus membuat pernyataan mengenai kesehatan fisik siswa penyandang disabilitas. "bentuk akomodasi yang layak berdasarkan ragam disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b bagi peserta didik dengan disabilitas intelektual. Penyesuaian rasio antara jumlah guru/dosen dengan jumlah peserta didik dengan disabilitas intelektual dalam kelas", sesuai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2020. Maka, kebijakan sudah tertera namun kenyataan dan fakta di lapangan pendidikan inklusif

belum banyak dipahami oleh guru diluar sana sehingga membutuhkan persepsi guru terkait pendidikan inklusif

Pengalaman inklusif pada anak-anak normal dan anak-anak dengan kebutuhan khusus serta keluarga mereka bertujuan untuk membangun dan belajar bagaimana mencapai potensi penuh mereka, serta untuk menciptakan hubungan sosial yang positif dan persahabatan [8]. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dimana persamaan tujuannya adalah Menyatakan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya guru pendamping khusus pada beberapa wilayah dan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini mengungkap fenomena yang terjadi dalam pengimplementasian pendidikan inklusi jenjang PAUD dilihat dari persepsi, keterpenuhan dan fasilitas [9]. Diharapkan program pendidikan inklusi ini akan menyelesaikan masalah dalam dunia pendidikan dengan mewujudkan pendidikan yang adil. Dalam kelas reguler, baik anak reguler maupun peserta didik dengan kebutuhan khusus akan belajar bersama untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. [10] untuk memberikan anak-anak yang mengalami abnormalitas di berbagai bidang kehidupan mereka pilihan pendidikan yang paling luas yang memungkinkan, kebijakan pemerintah mengatur program pendidikan inklusi. Program ini juga menanamkan anti-diskriminasi dan menghargai keanekaragaman anak.

Mendorong partisipasi penuh anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan bermasyarakat adalah salah satu tujuan dari pendidikan inklusi. [10]. Anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusi mendapatkan manfaat dari peningkatan mobilitas, kemandirian, dan perkembangan bicara, di samping hasil sosial dan akademik yang lebih baik. [11]. Anak-anak berkebutuhan khusus dapat terlibat dengan dunia sosial melalui pendidikan inklusi, yang meningkatkan pembelajaran melalui interaksi, peniruan, dan pengamatan. Siswa dengan dan tanpa kebutuhan khusus dapat berinteraksi dan mencapai potensi penuh mereka dalam pendidikan inklusif [12]. Hanya dengan meningkatkan inklusi sekolah umum, sistem pendidikan dapat menjadi lebih inklusif. [13]. Maka, inklusi digambarkan sebagai proses mengenali dan memenuhi berbagai kebutuhan semua anak, remaja, dan orang dewasa dengan mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pendidikan, masyarakat, dan budaya, serta pengurangan juga penghapusan pengucilan di sekolah dan di luar sekolah. Selama proses ini, isi, pendekatan, struktur, dan strategi perlu diubah dan diubah. Visi umumnya adalah semua anak dalam rentang usia yang sesuai, dan sistem reguler percaya bahwa mendidik semua anak adalah tanggung jawabnya. Kurikulum inklusif juga mempertimbangkan perkembangan emosional, sosial, kreatif, dan kognitif siswa. Empat pilar pendidikan di abad kedua puluh satu, pembelajaran, perbuatan, keberadaan, dan hidup bersama merupakan landasan yang mendasari kursi ini.

Namun, dalam kenyataannya, semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, institusi, guru, lingkungan sekolah, masyarakat, dan orang tua, tidak mendukung tujuan pendidikan inklusi. Prasarana dan fasilitas sekolah yang menawarkan pendidikan inklusif juga harus memadai agar pembelajaran berorientasi inklusi dapat berfungsi dengan baik. Sederhananya, setiap anak mempunyai kesempatan

yang sama untuk mengenyam pendidikan. Namun, ada pendidikan khusus yang dirancang khusus untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus [14]. Jika implementasi pendidikan inklusif tidak dilakukan dengan baik, dapat menimbulkan dampak negatif bagi siswa berkebutuhan khusus dan seluruh komunitas sekolah [15]. Dampak terhadap siswa berkebutuhan khusus antara lain: anak berkebutuhan khusus tidak dapat menerima sumber daya dan bantuan yang mereka perlukan untuk belajar dan tumbuh secara efisien. Anak berkebutuhan khusus mungkin merasa terisolasi dan dikucilkan dari teman sebaya mereka jika mereka tidak terintegrasi sepenuhnya ke dalam lingkungan belajar. Anak berkebutuhan khusus mungkin mengalami kesulitan akademis jika mereka tidak menerima pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Anak berkebutuhan khusus mungkin merasa minder serta tidak percaya diri jika mereka merasa berbeda atau tidak diterima

Dampak pada seluruh komunitas sekolah, diantaranya: implementasi pendidikan inklusif yang buruk dapat menciptakan lingkungan belajar yang terkotak-kotak, di mana siswa berkebutuhan khusus dipisahkan dari teman sebaya mereka. Guru dan anak mungkin tidak memiliki pemahaman dan penerimaan yang tidak memadai terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, yang dapat menyebabkan lingkungan yang tidak mendukung. Implementasi pendidikan inklusif yang buruk dapat membebani guru dan staf sekolah secara tidak merata, menyebabkan kelelahan dan stres. Kurangnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan profesional lainnya dapat menghambat implementasi pendidikan inklusif yang efektif. Dampak jangka panjangnya, diantaranya: anak berkebutuhan khusus yang tidak menerima pendidikan inklusif yang berkualitas mungkin mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan dan hidup mandiri di masyarakat anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan dukungan yang mereka perlukan di sekolah mungkin lebih bergantung pada layanan sosial di kemudian hari. Implementasi pendidikan inklusif yang buruk dapat memperburuk ketimpangan sosial dengan menciptakan hambatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Dari hasil observasi dan wawancara banyak sekolah yang keliru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi yaitu salah satunya sekolah menjadi sarang bully kepada anak berkebutuhan khusus karena tidak tahu penanganan pendidikan inklusi seperti apa. Agar semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dapat memperoleh manfaat dari lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif diterapkan dengan baik di TK.

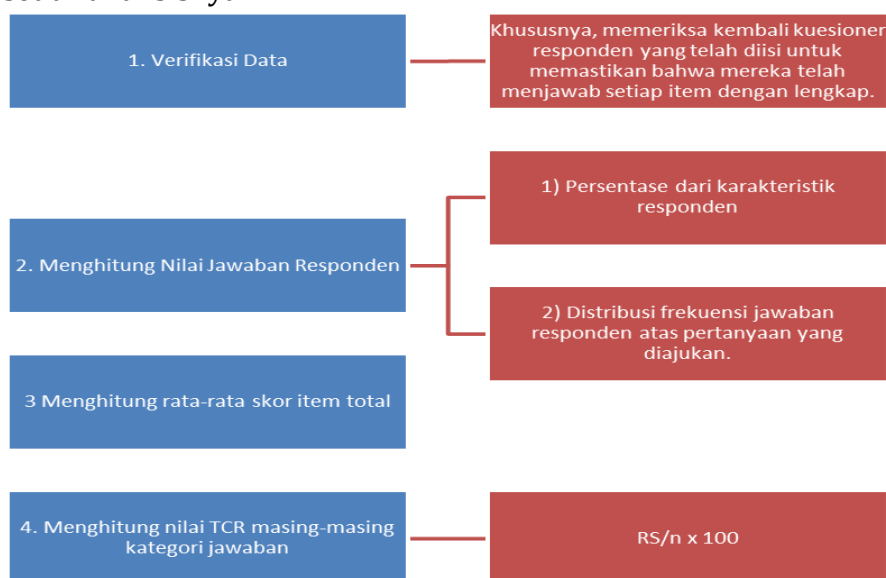
## **METODE**

Teknik penelitian survei dengan pendekatan metode kuantitatif digunakan dalam desain penelitian ini. Implementasi pendidikan inklusi pada jenjang pendidikan anak usia dini di TK Kota Tasikmalaya Tahun Ajaran 2023-2024 dapat lebih dipahami dan dikategorikan oleh peneliti dengan lebih baik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan cara yang jelas dan tepat, dengan menggunakan statistik deskriptif untuk mengukur data. Menurut Effendi, metode survei adalah teknik

yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mendapatkan sampel dari suatu masyarakat [16]. Dalam penelitian ini, metode survei digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai implementasi pendidikan inklusi pada jenjang pendidikan anak usia dini di TK Kota Tasikmalaya. Untuk mendapatkan data atau informasi mengenai sampel dengan gambaran umum mengenai implementasi pendidikan inklusi pada jenjang pendidikan anak usia dini di TK di Kota Tasikmalaya, peneliti berencana menggunakan kuesioner dengan indikator persepsi, keterpenuhan sekolah dan fasilitas sekolah. Untuk mengumpulkan informasi dari sampel yang diteliti, yang meliputi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan tahun ajaran 2023-2024.

Peneliti memilih menggunakan metode kuantitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena yang terjadi dalam penerapan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan anak usia dini di Kota Tasikmalaya. Peneliti menggunakan survei dengan kuisenar karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterpenuhan pelaksanaan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan anak usia dini di Kota Tasikmalaya, untuk mendeskripsikan persepsi guru, keterpenuhan dan memaparkan fasilitas pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan anak usia dini di Kota Tasikmalaya sudah baik atau tidak. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara ke psikolog dan 3 orang tua. Dan melakukan workshop ke 5 sekolah. Desain survei yang terdiri dari 67 guru yang dipilih dari 17 sekolah inklusi menjadi responden 31 guru untuk validasi. Teknik purposive sampling digunakan karena sekolah yang menjadi inklusif hanya sedikit yaitu ada 5 sekolah dan 36 guru dengan berdasarkan rekomendasi dari dinas pendidikan.

Metode Analisis Data dan Analisis Deskriptif Tabel digunakan dalam studi deskriptif atau eksplanatori ini. Tabulasi data digunakan untuk mengorganisir dan menganalisis data sesuai dengan jawaban kuesioner yang diperoleh dari tanggapan responden. Analisis ini akan memperjelas kondisi masing-masing variabel saat ini. Berikut prosedur analisisnya:



**Gambar 1. Proses Analisis Deskriptif**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data diklasifikasikan menjadi 3 bagian, persepsi, keterpenuhan dan fasilitas. Analisis deskriptif hanya melihat frekuensinya saja. Data hasil telaah metode pengolahan data statistik melalui SPSS. Hasil uji deskriptif menghasilkan temuan sebagai berikut:

**Tabel 2. Persepsi Guru**

SKOR	MEAN	TCR	
132,0	3,6666667	73%	
138,0	3,83	77%	
155,0	4,3	86%	
151,0	4,2	84%	
137,0	3,8	76%	
126,0	3,5	70%	
154,0	4,3	86%	
141,0	3,9	78%	
<b>Total</b>	<b>1134,0</b>	<b>3,9538095</b>	<b>79%</b>

Data menunjukkan bahwa, dengan tingkat pencapaian responden sebesar 79% yang masuk ke dalam kategori baik, persepsi guru terhadap implementasi pendidikan inklusi di tingkat PAUD di Kota Tasikmalaya memiliki skor rata-rata sebesar 3,95.

**Tabel 3. Deskripsi Keterpenuhan Sekolah**

SKOR	MEAN	TCR
96	2,67	53%
103	2,86	57%
97	2,69	54%
96	2,67	53%
86	2,39	48%
86	2,39	48%
105	2,92	58%
103	2,86	57%
113	3,14	63%
127	3,53	71%
121	3,36	67%
104	2,89	58%
97	2,69	54%
114	3,17	63%
113	3,14	63%
119	3,31	66%
122	3,39	68%
118	3,28	66%
102	2,83	57%
100	2,78	56%

100	2,78	56%	
99	2,75	55%	
99	2,75	55%	
117	3,25	65%	
99	2,75	55%	
114	3,17	63%	
124	3,44	69%	
112	3,11	62%	
102	2,83	57%	
109	3,03	61%	
103	2,86	57%	
101	2,81	56%	
108	3,00	60%	
97	2,69	54%	
96	2,67	53%	
91	2,53	51%	
103	2,86	57%	
92	2,56	51%	
91	2,53	51%	
129	3,58	72%	
82	2,28	46%	
94	2,61	52%	
<b>Total</b>	<b>4384</b>	<b>2,90</b>	<b>58%</b>

Berdasarkan data tersebut, implementasi pendidikan inklusi di Kota Tasikmalaya mendapatkan nilai rata-rata 2,90 di tingkat PAUD, dengan 58% responden masuk ke dalam kategori pencapaian yang cukup.

**Tabel 4. Deskripsi Fasilitas Sekolah**

SKOR	MEAN	TCR	
147	4,08	82%	
127	3,53	71%	
104	2,89	58%	
114	3,17	63%	
94	2,61	52%	
129	3,58	72%	
86	2,39	48%	
85	2,36	47%	
95	2,64	53%	
106	2,94	59%	
100	2,78	56%	
<b>Total</b>	<b>1187</b>	<b>3,00</b>	<b>60%</b>



Dengan tingkat capaian responden sebesar 60%, skor rata-rata Kota Tasikmalaya untuk fasilitas penyelenggaraan pendidikan inklusi di tingkat PAUD adalah 3,00, masuk dalam kategori cukup. Penelitian ini dilakukan di 5 sekolah dengan mengadakan workshop sekaligus menyebar kuisisioner. 5 sekolah ini menjadi sorotan penelitian karena direkomendasikan oleh ketua IGTKI (ikatan guru TK Indonesia) dan Kepala dinas pendidikan kota Tasikmalaya. Tetapi kuisisioner disebar kesetiap sekolah yang ada di TK dengan total kurang lebih ada 17 sekolah dan 67 guru. 31 jadi uji validitas dan sisanya menjadi responden penelitian.

Hasil observasi dari 5 sekolah ini berbeda-beda. Sekolah yang benar-benar menerapkan inklusi hanya 1 yaitu sekolah BIK karena sesuai prosedur dalam regulasi untuk pendidikan inklusi. Sekolah "K" itu banyak kekeliruan dalam pelaksanaan salah satunya lebih banyak ABK (anak autisme) dibanding anak normal. Sedangkan jika dilihat dari regulasi bahwa rentang kelas maksimal 2 abk dalam 1 rombel. Sekolah "J" menekankan bahwa mereka tidak sekolah inklusi padahal nyatanya dalam sekolah reguler jika ada anak berkebutuhan khusus itu sekolah menjadi inklusi. Sekolah A menjadi sekolah inklusi tapi hal basic seperti GPK belum tahu, dan sekolah IT adalah sekolah yang tidak dibiayai oleh pemerintah atau tidak adanya anggaran tetapi menjalankan sekolah inklusi dengan 1 anak down syndrome dan 1 anak ADHD.

Terlintas dalam benak guru yang bukan notabene dari abk bahwa yang paling sulit adalah bukan mengajar anak abk tapi justru anak normal. Karena harus memberi pemahaman kepada anak normal bahwa mereka anak spesial. Sekolah justru menjadi sarang bully jika pendidikan inklusi tidak diimplementasikan sesuai tahapannya. Seperti adanya tahapan tumbuh kembang dan tahapan bermain yang sudah diterapkan di BIK. Adanya tumpang tindih persepsi mengenai pendidikan inklusi membuat implementasinya pun acak-acakan. Dari 5 sekolah sangat berbeda-beda persepsi. Dalam wawancara bersama 3 orang tua menyimpulkan bahwa anak yang dimasukkan ke dalam pendidikan inklusi yang benar-benar menerapkan implementasinya membuat anak mandiri, dapat bersosialisasi, dan bermain bersama anak lain yang tidak berkebutuhan khusus. Berbeda halnya di sekolah reguler umumnya menjadi sarang perbullyan untuk anak berkebutuhan khusus. Pentingnya persepsi, keterpenuhan dan fasilitas yang selaras dan baik membuat sekolah yang memberikan hak sama untuk semua anak baik itu anak berkebutuhan khusus dan anak tidak berkebutuhan khusus sesuai dengan teori Montessori bahwa pendidikan yang berdasarkan pemahaman dan toleransi terhadap keberagaman yang merupakan aspek penting dalam pendidikan inklusi.

Adanya persyaratan pendidikan inklusi dikatakan penuh meliputi: [17] 1) bekerja sama dengan pusat sumber (klinik tumbuh kembang anak, dokter, psikolog, terapis terapis) karena pusat sumber itu untuk umum [18]. Namun kebanyakan Sekolah tidak mau terbuka. Sekolah yang baik itu open stakeholder dan minimal menggandeng psikolog. *Emosional delay, speech delay* semuanya tangani dulu sampai beres. Dalam peraturan inklusi Resource center. Harus terapi dulu (belum tahu bahaya, lempar-lempar). Terapi perilaku (untuk emosi, tahu konsistensi, ada kemauan berbicara) kalau sudah lulus baru diterapi bermain. Adanya pelatihan disetiap guru. Modal fokus adalah

gerak. (senam harus setiap hari ) permainan tradisional Gerakan aturan mainya karena gerak. Motorik kasar keseimbangan untuk fokus. 2) Harus ada shadow teacher (GPK) [19]. Pada dasarnya GPK backgroundnya pgpaud, psikologi, pendidikan inklusi tetapi kebanyakan pemahaman mengenai GPK itu seperti ART. 3) perbandingan ABK dengan anak normal atau tidak ada delay 1:5 supaya tujuan inklusi tercapai. 4) Adanya pelatihan (kompetensi guru harus terlatih) contohnya program *parenting*[9]. 5) Adanya kerja sama dengan orang tua (cheklist adaptif perilakunya) [20]. 6) Masuk kesekolah sekolah tidak asal terima [21]. Berdasarkan observasi dilakukan peneliti, yang *speech delay* dimasukin ke SLB. Adanya pemahaman asesmen sehingga tidak asal menerima karena bullying salah satu masalah implementasi pendidikan inklusi karena sekolah asal menerima tanpa adanya asesmen.

Mengukur partisipasi dan inklusi siswa membutuhkan keseimbangan antara penghargaan terhadap proses perkembangan individu seorang anak (termasuk bagaimana mereka melihat dunia dengan disabilitas secara pribadi), kemampuan untuk menawarkan dukungan khusus untuk proses pembelajaran anak, dan hubungan akademik yang dimiliki sebuah sekolah dengan semua siswanya. Untuk menghindari pengucilan, dukungan terhadap praktik pedagogis tidak boleh melewati batas praktik pengajaran itu sendiri. Sebaliknya, kurangnya dukungan pembelajaran khusus untuk mencapai inklusi penuh juga dapat menghambat partisipasi siswa dengan tidak memberikan apa yang dibutuhkan siswa untuk berpartisipasi dalam proses dan kegiatan [15]. Semua siswa, termasuk mereka yang tunarungu, tunawicara, dan tuna grahita, bersekolah di sekolah reguler sebagai bagian dari pendidikan inklusif [21]. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai pendidikan yang menghargai keragaman. Karena itu, diperlukan pola pikir yang tidak membedakan anak-anak berdasarkan atribut ras, mental, fisik, atau agama mereka. Semua anak setempat yang berusia antara 0 hingga 6 tahun dipersilakan untuk mendaftar di program pendidikan anak usia dini PAUD inklusif, tanpa memandang perbedaan individu di antara mereka. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk bersekolah bersama anak-anak lainnya berkat PAUD inklusif.

Untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, PAUD Inklusi mengedepankan Program Pembelajaran Individual (PPI). Hal ini yang membedakan PAUD konvensional dengan bentuk PAUD lainnya. Di lembaga PAUD, pendidikan inklusif membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang. Hal ini mencakup menciptakan lingkungan kelas yang ramah, menghargai keragaman, dan menghargai perbedaan individu; penyesuaian kecil dalam implementasi kurikulum; mempersiapkan guru untuk pengajaran interaktif; menawarkan dukungan yang berkelanjutan kepada pendidik dan peserta didik; dan menaklukkan hambatan yang terkait dengan bekerja secara terpisah. Pengajar yang bekerja di kelas inklusif harus mampu menyesuaikan strategi pengajaran mereka dengan kebutuhan khusus setiap siswa. Hal ini dikarenakan setiap ABK sangat berbeda satu sama lain dalam hal sifat belajar mereka [22]. Salah satu tujuan pendidikan inklusif adalah untuk mencegah ketidakteraturan perkembangan yang lebih parah yang menyebabkan anak menjadi tidak berkemampuan. Untuk mengatasi masalah pendidikan inklusif, seperti *speech delay* dan *emotional delay*, pendekatan individu

digunakan. Maka, partisipasi orang tua dan guru sangat penting bagi keberhasilan pendidikan inklusif [23]. Lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan karakter, kepribadian dan kecerdasan anak karena pendidikan paling dasar itu berasal dari keluarga dan orang tua [24]. Peranan orang tua di rumah sangat penting sekali untuk menentukan perkembangan anak [25] Anak penyandang disabilitas adalah anak istimewa dan berhak untuk hidup di masyarakat [26]. Sistem pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pelayanan sosial yang berlaku seharusnya memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Penyandang Disabilitas harus memiliki kewajiban dan hak yang sama karena mereka memiliki hak yang sama. Sebagai bagian dari proses persamaan kesempatan, penyandang disabilitas seharusnya menerima bantuan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab secara penuh sebagai anggota masyarakat [27].

Pendidikan inklusif menekankan bahwa hak yang sama untuk pendidikan harus diberikan kepada setiap warga negara. Namun, untuk memastikan bahwa implementasi pendidikan inklusif tidak menghambat upaya dan prosesnya dan tetap selaras dengan filosofi dan konsep dasar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh [23], Salah satu kesulitan yang dihadapi pendidik adalah memastikan bahwa pengajaran mematuhi peraturan mengenai perencanaan, isi, dan pelaksanaan. Namun, para guru masih kesulitan mencapai keseimbangan antara pengajaran di PAUD inklusif sebab banyak tantangan yang menghalangi anak inklusi untuk bekerja sama dan mengikuti pembelajaran secara inklusif. Pemerintah Kota Ponorogo belum sepenuhnya membantu anak-anak PAUD inklusi, karena sarana dan prasarana yang ada tidak memadai dan belum ada penunjang pembelajaran khusus untuk mereka. Sebagian besar fasilitas sekolah reguler masih digunakan. Permainan Alat Permainan Edukatifnya masih sangat buruk. Salah satu tantangan lain bagi anak-anak PAUD inklusi adalah bahwa setiap anak harus memiliki asisten atau guru pendamping khusus. Untuk mengatasinya, diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras dari semua pihak, termasuk pendidik, kepala sekolah, dan orang tua. Maka, kesejahteraan anak berkebutuhan khusus dan kemampuan mereka untuk menikmati semua haknya sebagai warga negara dapat dicapai dengan cepat dan efektif [19]. Implementasi sekolah ramah anak, kepala sekolah memiliki peran penting sebagai pemimpin dalam mewujudkan lingkungan sekolah ramah anak di sekolah inklusi. Yaitu dengan melaksanakan kebijakan sekolah ramah anak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, melakukan pelatihan pada guru dan staff, memenuhi sarana dan prasarana sekolah sesuai standar, memberikan ruang partisipasi bagi siswa, dan melibatkannya orang tua siswa dalam setiap system yang diterapkan. Selain itu, peran lain kepala sekolah yaitu sebagai pendidik (*educator*), manajer, pemimpin (*leader*) dan sebagai pengawas (*supervisor*) [28].

Standar yang ditetapkan oleh undang-undang dan dikembangkan oleh pemerintah melalui inisiatif untuk meningkatkan standar pendidikan diperlukan untuk mencapai pendidikan inklusif [15]. Pendidikan inklusif menghadapi banyak masalah termasuk fasilitas disekolah pendidikan inklusif sendiri, kekurangan fasilitas dan tenaga kerja, dan banyak lagi [20]. Anak penyandang Disabilitas memiliki hak untuk hidup di masyarakat karena mereka adalah bagian dari masyarakat. Penyandang disabilitas

harus didukung oleh pendidikan umum, layanan kesehatan, peluang karir, dan layanan sosial karena mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Seharusnya para penyandang disabilitas menerima bantuan yang diperlukan sebagai bagian dari proses persamaan kesempatan. Untuk memungkinkan mereka mengambil tanggung jawab penuh sebagai anggota masyarakat.

Dalam teori pandangan Montessori (1870-1952) Peminatannya terhadap psikiater menyebabkan ia banyak terlibat dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Pengalaman yang sering dihadapinya lebih pada permasalahan pendidikannya yang kemudian berkembang pada metode pembelajaran dengan anak normal. Teori Montessori menekankan pada pendekatan, metode, material dan kesiapan lingkungan untuk mendukung dan mendorong pembelajaran [29]. Teori budaya-historis Vygotsky yaitu Interaksi sosial, faktor kultural- historis, dan individual dalam proses perkembangan anak. Terdapat kesesuaian konsep "Zona Perkembangan Proksimal" (ZPD) Vygotsky dengan pendekatan inklusif [30]. Untuk memahami masalah yang ada di balik konsep pendidikan inklusif, pendidikan khusus, dan pengembangan manusia, wacana dan praktik dibandingkan satu sama lain dalam empat hal yang sangat penting: peran guru dalam pelaksanaan praktik pedagogis, dukungan untuk pendidikan khusus, fokus pada perkembangan manusia, dan partisipasi teman sebaya dalam pembelajaran ABK.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian survei yang dilakukan di 5 sekolah, 36 guru dan kepala sekolah menunjukkan bahwa 79% guru mempunyai persepsi yang setuju, 58% kategori cukup dalam ketepenuhan implementasi sekolah dan 60% dalam kategori cukup untuk fasilitas. Persepsi dari guru sudah menunjukkan adanya semangat dan persepsi yang baik terhadap implementasi pendidikan inklusi hanya saja dalam ketepenuhan sekolah dan fasilitas masih menjadi tantangan dan hambatan dalam pengimplementasian pendidikan inklusi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara hanya satu sekolah yang memiliki penekanan kuat terhadap pendidikan inklusif, sementara sekolah lainnya memiliki pendekatan yang lebih lemah. Penelitian ini juga menemukan bahwa sekolah harus terbuka untuk semua siswa, memberikan kesempatan yang sama, dan memiliki lingkungan yang mendukung. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif dapat membantu mengatasi masalah-masalah seperti keterlambatan emosi dan bicara, serta perundungan. Partisipasi dan antusiasme dalam pendidikan sangat penting untuk membina lingkungan yang harmonis bagi perkembangan individu, memastikan lingkungan belajar yang kondusif, dan membina kerja sama akademis. Pendidikan inklusi (PAUD) adalah lembaga pendidikan unik yang bertujuan untuk menyediakan lingkungan belajar yang unik bagi semua anak. Hal ini melibatkan penciptaan komunitas belajar yang inklusif, mempromosikan interaktivitas, dan mendorong pengembangan profesional. Kesetaraan hak dan kesempatan bagi anak-anak penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat penting, dan sistem pendidikan harus inklusif dan mudah diakses oleh semua orang. Namun, implementasi pendidikan inklusif sering kali kekurangan sumber daya dan dukungan yang diperlukan, sehingga

mempengaruhi kualitas pendidikan untuk semua anak. Penelitian ini menunjukkan data presentase terbaru dalam implementasi pendidikan inklusi di Kota Tasikmalaya dan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

## **PENGHARGAAN**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala sekolah dan Guru TK di Kota Tasikmalaya yang telah membantu penelitian ini. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada editor dan reviewer Jurnal Murhum yang telah memberikan kesempatan untuk jurnali ini bisa diterbitkan/dipublish.

## **REFERENSI**

- [1] M. N. Fakhrol, M. Abdurahim, A. Afriansyah, and U. Ubaidah, "Kebijakan Pendidikan Nasional Pada Anak Berkebutuhan Khusus," *Divers. J. Ilm. Pascasarj.*, vol. 3, no. 1, Apr. 2023, doi: 10.32832/djip-uika.v3i1.8665.
- [2] K. P. Wati, S. Indriani, and O. Andriani, "Menjawab Kebijakan Pemerintah Mengenai Perkembangan Dunia Tentang Pendidikan Inklusi," *Dharma Acariya Nusant. J. Pendidikan, Bhs. Dan Budaya*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: 10.47861/jdan.v1i2.730.
- [3] D. Istighfarin *et al.*, "Model Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi MI Nur Hidayah," *J. Innov. Educ.*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: 10.59841/inoved.v2i1.852.
- [4] D. Wijayanti, "Focus Group Discussion Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif pada Guru KB TK Alam Efata Bersinar Salatiga Focus," *Community Professional Serv. Journa*, vol. 2, no. 1, pp. 38–47, 2024, doi: 10.57213/compromisejournal.v2i1.174.
- [5] T. A. Palintan, N. Ashari, and A. Rauf, "Efektivitas Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus pada Guru Pendidikan Anak Usia Dini," *JIVA J. Behav. Ment. Heal.*, vol. 4, no. 2, pp. 133–143, Dec. 2023, doi: 10.30984/jiva.v4i2.2844.
- [6] J. G. Mayang, "Hak Konstitusional Anak Di Desa Untuk Mendapat Pendidikan Yang Layak Di Indonesia," *Lex Priv.*, vol. 12, no. 3, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52470>
- [7] R. Devianti and S. L. Sari, "Urgensi Analisis Kebutuhan Peserta Didik Terhadap Proses Pembelajaran," *J. Al-Aulia*, vol. 6, no. 1, pp. 21–36, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.stai-tbh.ac.id/al-aulia/article/view/189>
- [8] R. S. A. Widhiati, E. Malihah, and S. Sardin, "Dukungan Sosial dan Strategi Menghadapi Stigma Negatif Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pendidikan," *J. Paedagogy*, vol. 9, no. 4, p. 846, Oct. 2022, doi: 10.33394/jp.v9i4.5612.
- [9] A. S. Aminulloh, M. I. Purnamasari, and L. Erviana, "Kesiapan Sekolah dalam Melaksanakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Inklusi Kabupaten Pacitan Wilayah Timur," *Sch. J. Elem. Sch.*, vol. 4, no. 1, pp. 58–69, Jan. 2024, doi: 10.21137/sjes.2024.4.1.6.
- [10] N. K. N. Suastariyani and L. A. Tirtayani, "Survei persepsi orang tua mengenai program PAUD inklusi di Kota Denpasar tahun 2020," *J. Pendidik. Anak Usia Dini Undiksha*, vol. 8, no. 2, pp. 80–90, 2020, doi: 10.23887/paud.v8i2.25156.
- [11] J. Jesslin and F. Kurniawati, "Perspektif Orangtua terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif," *JPI (Jurnal Pendidik. Inklusi)*, vol. 3, no. 2, p. 72, Apr.

- 2020, doi: 10.26740/inklusi.v3n2.p72-91.
- [12] E. Baroroh and R. Rukiyati, "Pandangan Guru dan Orang Tua tentang Pendidikan Inklusif di Taman Kanak-Kanak," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 6, no. 5, pp. 3944–3952, Mar. 2022, doi: 10.31004/obsesi.v6i5.2510.
- [13] H. N. Fauzan, L. Francisca, V. I. Asrini, I. Fitria, and A. A. Firdaus, "Sejarah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Menuju Inklusi," *PENSA J. Pendidik. dan Ilmu Sos.*, vol. 3, no. 3, pp. 496–505, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/view/1566>
- [14] D. Mustika *et al.*, "Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan Bagi Semua Anak," *Student Sci. Creat. J.*, vol. 1, no. 4, pp. 41–50, 2023, doi: 10.55606/sscj-amik.v1i4.1575.
- [15] A. N. Taufik and T. Rahaju, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk Mewujudkan Kesetaraan Belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Tingkat SMA di Surabaya," *Publika*, vol. 9, no. 3, pp. 139–154, May 2021, doi: 10.26740/publika.v9n3.p139-154.
- [16] Ardiansyah, Risnita, and M. S. Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *J. IHSAN J. Pendidik. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 1–9, Jul. 2023, doi: 10.61104/ihsan.v1i2.57.
- [17] J. E. Sirait, "Spiritualitas inkarnatif sebagai fondasi pendidikan kristiani yang inklusif," *KURIOS*, vol. 9, no. 2, p. 331, Aug. 2023, doi: 10.30995/kur.v9i2.145.
- [18] S. E. Sulistyana and N. W. Gati, "Gambaran tingkat depresi pada orangtua dengan anak autisme di upgd pusat layanan disabilitas dan pendidikan inklusif kota surakarta," *J. Ilm. Penelit. Mandira Cendikia*, vol. 1, no. 3, pp. 18–26, 2023, [Online]. Available: <https://journal-mandiracendikia.com/index.php/mdi/article/view/518>
- [19] D. Kriswanto, Suyatno, and Sukirman, "Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar: Analisis Faktor-Faktor dan Solusi yang Ditawarkan," *J. Basicedu*, vol. 7, no. 5, pp. 3081–3090, Nov. 2023, doi: 10.31004/basicedu.v7i5.6167.
- [20] R. Nurhayati, "Fenomena Pendidikan Inklusif, Antara Kebijakan dan Kenyataan," *J. Ilmu Pendidik. dan Psikol.*, vol. 1, pp. 1–23, 2024, [Online]. Available: <https://journal.pipuswina.com/index.php/jippsi/article/view/12>
- [21] A. nurul Kawakip, M. I. Mukmin, S. C. Ayu, and A. Q. Muslim, "Pengelolaan Sekolah Inklusi: Studi Multi Situs pada Sekolah Islam di Jawa Timur," *Eval. J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 103–121, Apr. 2023, doi: 10.32478/evaluasi.v7i1.1237.
- [22] Ika, R. Yoyon, and A. Aziz, "Pendidikan Inklusi Dalam Strategi Fun Learning di Bimba Rainbow Kids Cisauk-Tangerang," *KHIRANI J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 2, no. 1, pp. 06–18, 2024, doi: 10.47861/khirani.v1i4.814pendidikan.
- [23] D. Safitri and Y. Salis Hijriyani, "Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Mewujudkan Pendidikan Menyuluruh Bagi Anak Usia Dini," *Pros. Loka Karya Pendidik. Islam Anak Usia dini IAIN Ponogoro*, vol. 1, no. 1, pp. 27–39, 2021, [Online]. Available: <https://prosiding.iainponogoro.ac.id/index.php/piaud/article/view/448>
- [24] M. Shaleh, B. Batmang, and L. Anhusadar, "Kolaborasi Orang Tua dan Pendidik dalam Menstimulus Perkembangan Keaksaraan Anak Usia Dini," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 6, no. 5, pp. 4726–4734, Jun. 2022, doi: 10.31004/obsesi.v6i5.2742.
- [25] E. N. Junita and L. Anhusadar, "Parenting Dalam Meningkatkan Perkembangan Perilaku Sosial Anak Usia 5-6 Tahun," *Yaa Bunayya J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 5, no. 2, pp. 57–63, 2021, doi: 10.24853/yby.v5i2.11002.

- [26] R. Munauwarah, A. Zahra, M. Supandi, R. A. Restiany, and D. Afrizal, "Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas," *YASIN*, vol. 1, no. 1, pp. 121–133, Oct. 2021, doi: 10.58578/yasin.v1i1.21.
- [27] N. Aisyah and D. R. Amalia, "Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perspektif HAM & Pendidikan Islam di MINU Purwosari Metro Utara," *Attactive Innov. Educ. J.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2020, doi: 10.51278/aj.v2i1.37.
- [28] N. Izzah, Y. Setianti, and O. Tiara, "Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Sekolah Inklusi," *Murhum J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 4, no. 2, pp. 272–284, Sep. 2023, doi: 10.37985/murhum.v4i2.236.
- [29] K. Pendidikan, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. 2020.
- [30] M. O'Kane, *Transition from Preschool to Primary School*, no. 19. Transition from Preschool to Primary School, 2016. [Online]. Available: [https://ncca.ie/media/3196/3754\\_ncca\\_researchreport19\\_lr.pdf](https://ncca.ie/media/3196/3754_ncca_researchreport19_lr.pdf)